

**KEBEBASAN DAN KAPABILITAS SEBAGAI KRITERIA ETIS:
Kajian Mengenai Pandangan Etika Amartya Sen
dalam Ide Kebebasan dan Integrasinya ke dalam Teori Pilihan Sosial**

RINGKASAN DISERTASI

Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Doktor dari

STF Driyarkara

Oleh

SUNARYO

NIM: 0280108512

Program Doktor



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA

2015

Promotor : Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno

Ko-Promotor I : Dr. B. Herry-Priyono

Ko-Promotor II : Dr. Karlina Supelli

Penguji : Prof. Dr. Alex Lanur

Dr. Mikhael Dua

Dr. Simon Petrus Lili Tjahjadi



UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno yang telah memberikan bimbingan dengan memberikan catatan dan juga dukungan untuk menyelesaikan penelitian disertasi ini. Kepada Dr. B. Herry-Priyono saya mengucapkan terima kasih karena sebagai Ko-Promotor I, beliau telah membantu saya memahami pemikiran Amartya Sen dengan lebih baik. Ada banyak catatan dan masukan yang sangat penting yang telah diberikan selama penulisan disertasi. Kemudian, kepada Dr. Karlina Supelli, selaku Ko-Promotor II, saya mengucapkan terima kasih karena telah banyak membantu saya dengan memberikan catatan dan masukan agar hasil penelitian disertasi ini menjadi semakin baik. Saya juga perlu mengucapkan terima kasih kepada Dr. Karlina karena telah menghubungkan saya dengan Herb Feith Foundation yang kemudian memberikan beasiswa bagi program doctoral saya di STF Driyarkara.

Kemudian kepada Prof. Dr. Alex Lanur, saya mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi penguji disertasi saya dengan memberikan begitu banyak catatan. Meski cukup melelahkan namun saya senang karena hasil penelitian saya telah dibaca dengan sangat detail. Kepada Dr. Mikhael Dua, saya mengucapkan terima kasih karena selama ujian selalu mengingatkan hal-hal mendasar yang kadang saya alpa. Kepada Dr. Simon Petrus Lili Tjahjadi saya mengucapkan terima kasih karena telah turut menguji dalam sidang promosi saya. Kepada Prof. Dr. J. Sudarminta, saya mengucapkan terima kasih karena sebagai Direktur Program Doktor STF telah memberikan layanan yang sangat baik.

Kepada seluruh pengajar dan staf di STF, mulai dari program sarjana hingga doctoral, saya mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam. Saya sungguh menikmati kampus STF Driyarkara sebagai "pesantren" kedua saya sejak dari masa S1 hingga S3. Ada begitu banyak pelajaran yang saya dapatkan di kampus ini. Bukan hanya perkara akademis, tetapi juga tentang hubungan sosial di dalam lingkungan yang penuh keragaman. Semoga apa yang saya dapatkan selama di STF Driyarkara menjadi inspirasi bagi kehidupan saya selanjutnya.

Kepada Dr. Djin Siauw dan Prof. Greg Barton dari Herb Feith Foundation saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan dukungan beasiswa bagi program doctoral saya di STF Driyarkara Jakarta. Dana beasiswa itu sungguh telah banyak membantu saya menyelesaikan program doctoral di STF.

Kepada rekan-rekan saya di Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia) dan Nurcholish Madjid Society (NCMS), saya mengucapkan terima kasih karena telah membangun suasana yang memungkinkan saya (dan juga rekan-rekan yang lain) selalu berhasrat untuk belajar. Secara khusus ucapan terima kasih ini saya berikan kepada Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo, Yudi Latif, Ph.D, Dr. Budhy Munawar-

Rachman, Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer, (Ibu) Omi Komaria Madjid, Wahyuni Nafis, MA, Henry Simarmata, Fachrurozi (terima kasih untuknya karena sudah mau membaca naskah disertasi dan mengoreksi kesalahan-kesalahan penulisan di dalamnya), Goeswin Noer Rizal, Ahmad Sapei, Hiton Bazawi, Edwin Arifin dan beberapa rekan lain yang tidak bisa disebut satu per satu.

2

Kepada rekan-rekan saya di Program Studi Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Secara khusus kepada Aan Rukmana, MA, M. Subhi Ibrahim, M. Hum. Pipip. A. Rifai Hasan Ph.D dan beberapa nama yang tidak disebutkan. Kepada semuanya saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan ilmu yang saya miliki.

Kepada istri saya, Tri Widya Rani, dan dua putra saya, Fatih Mawla Yustisia (6 tahun) dan Farabi Arif Yustisia (4 tahun), saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan dukungan yang sangat besar sehingga saya bisa menyelesaikan studi doktoral ini. Kepada semua keluarga, Ulfah Yulianti (adik) Ahmad Nahoi (adik), Wahyudin (kaka), Bapa dan Ibu mertua, saya mengucapkan terima kasih.

Terakhir untuk ayah (almarhum) dan ibu (almarhumah) saya mengucapkan terima kasih karena telah menanamkan nilai bahwa belajar adalah sepanjang hayat.

ABSTRAK

[A] SUNARYO (0280108512)

[B] **KEBEBASAN DAN KAPABILITAS SEBAGAI KRITERIA ETIS:**

Kajian Mengenai Pandangan Etika Amartya Sen dalam Ide Kebebasan dan Integrasinya ke dalam Teori Pilihan Sosial

[C] xi + 199; 2015; Daftar Pustaka

[D] Kata Kunci: kebebasan, kapabilitas, pilihan sosial, pilihan rasional, preferensi, nilai, kesejahteraan, kepelakuan, pemeriksaan kritis, area yang dilindungi.

[E] Isi disertasi ini merupakan kajian tentang pandangan etika Amartya Sen dalam ide kebebasan dan integrasinya ke dalam teori pilihan sosial (*social choice theory*). Ada dua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Yang pertama, dari rumusan mengenai kebebasan dan integrasinya ke dalam teori pilihan sosial, apa ukuran dan kriteria tindakan etis yang hendak diajukan Amartya Sen? Yang kedua, mengapa Sen mengkritik keras teori pilihan rasional (*rational choice theory*) yang dipahami sebagai maksimalisasi kepentingan-diri? Apa yang hendak ditunjukkan oleh Sen lewat kritik ini terkait dengan pandangannya mengenai etika?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis menyusun disertasi ini dalam tiga kerangka dasar yang akan dijelaskan dalam Bab II, III dan IV. Yang pertama adalah penjelasan tentang pandangan Sen mengenai kebebasan yang dipahami dalam dua aspek, yakni aspek proses dan kesempatan real. Yang kedua adalah mengenai kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*), kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) dan kritik terhadap teori pilihan rasional. Yang ketiga adalah uraian mengenai integrasi kebebasan ke dalam pilihan sosial.

Dari tiga kerangka kerja ini, penulis mengajukan kesimpulan bahwa tindakan etis menurut Sen diukur pada sejauh mana tindakan itu melindungi kebebasan dan memperluas kapabilitas. Yang dimaksud dengan perlindungan kebebasan adalah adanya perhatian terhadap hak dan kebebasan setiap orang dengan tidak melangkahninya. Sementara yang dimaksud dengan perluasan kapabilitas adalah penguatan kemampuan seseorang atau masyarakat dalam mencapai sesuatu. Sementara melalui kritik atas teori pilihan rasional, ia memahami bahwa rasionalitas pilihan tidak diukur pada maksimalisasi kepentingan-diri, tetapi pada sejauh mana sebuah pilihan telah diperiksa secara kritis. Dalam pandangannya, tindakan etis yang didasarkan pada komitmen yang sudah melewati proses pemeriksaan kritis (*critical scrutiny*) dapat disebut rasional meski tidak memaksimalkan kepentingan-diri. Inilah kesimpulan yang dapat ditarik dan sekaligus menjadi tesis penulis mengenai kriteria etis menurut Amartya Sen.

[F] Pustaka 104 (1906-2015)

[G] Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno; Dr. B. Herry-Priyono; Dr. Karlina Supelli

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih.....	3
Abstrak.....	5
Daftar Isi.....	6
1. Pendahuluan.....	7
2. Metode Penelitian.....	10
3. Tentang Amartya Sen.....	11
4. Tentang Kebebasan dan Kapabilitas.....	12
5. Kritik atas Teori Pilihan Rasional.....	13
6. Tentang Teori Pilihan Sosial.....	15
7. Pilihan Sosial Berbasis-Kebebasan.....	18
8. Kebebasan dan Kapabilitas sebagai Kriteria Etis.....	24
9. Penutup.....	27
Daftar Pustaka.....	30
Riwayat Hidup.....	36

1. Pendahuluan

Tema mengenai kebebasan merupakan salah satu tema besar dalam pemikiran Amartya K. Sen. Beberapa karya besarnya telah diabdikan untuk menjelaskan masalah kebebasan yang ia hubungkan dengan masalah kemiskinan, ketidakadilan dan teori pilihan sosial (*social choice theory*). Pandangannya mengenai hal ini dapat dibaca dalam *The Idea of Justice* (2009), *Rationality and Freedom* (2004), *Development as Freedom* (1999), *Inequality Reexamined* (1992) dan dalam berbagai tulisan yang tersebar di banyak jurnal ilmiah. Mengapa ide kebebasan menjadi sangat penting bagi Amartya Sen sehingga hampir selalu menjadi perspektif yang tidak pernah luput dalam analisisnya mengenai persoalan ekonomi dan masalah sosial? Paling tidak ada dua pertimbangan yang bisa dilihat sebagai penjelasan mengapa kebebasan menjadi penting bagi Sen. Yang pertama adalah karena kebebasan menjadi sesuatu yang bernilai pada dirinya dan yang kedua karena kebebasan yang lebih besar akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk meraih tujuan-tujuan yang hendak dicapai (Sen 1999, 18; 2009, 228).

Dalam memahami kebebasan, Sen membaginya menjadi dua aspek, yakni aspek proses dan aspek kesempatan real (*real opportunity*) (Sen 2009, 228).¹ Yang dimaksud dengan kebebasan dalam arti proses adalah bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk memilih sesuatu yang dianggap baik tanpa ada paksaan dari pihak luar. Sementara kebebasan dalam arti kesempatan real dipahami sebagai kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*) sesuatu yang dianggap baik dan bernilai. Ia menyebut kebebasan dalam arti "kemampuan untuk mencapai" sebagai kapabilitas. Konsep kapabilitas menjadi konsep sentral bagi Sen dalam menganalisis masalah kemiskinan dan ketidakmampuan (deprivasi kapabilitas). Melalui konsep ini, ia menekankan makna

¹ Penjelasan mengenai dua aspek kebebasan ini dapat dilihat dalam beberapa karya Sen di antaranya adalah Amartya Sen, "Market and Freedoms," *Oxford Economic Papers* 45 (1993): 522; Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, INC, 1999), 17; Amartya Sen, *Rationality and Freedom* (Cambridge, MA: Harvard University Press, [2002] 2004), 10, 585; Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), 228. Menurut Sen, pada umumnya, pandangan mengenai kebebasan banyak diasosiasikan dengan karya-karya para libertarian seperti Hayek, Nozick, J.M. Buchanan dan lain-lain. Namun, katanya, argumen awal mengenai pentingnya kebebasan sebenarnya juga bisa kita dapatkan dalam filsafat politik Karl Marx. Marx memahami kebebasan sebagai kondisi di mana individu dapat mengembangkan aktivitas di dalam kontrolnya. Kebebasan dalam arti ini lebih dimaknai sebagai kebebasan positif yang kerap diperlawankan dengan kebebasan negatif. Lih. Amartya Sen, *Inequality Reexamined* (Oxford: Oxford University Press, 1992), 41 dalam catatan kaki no. 8.

kebebasan sebagai kemampuan pelaku untuk meraih sesuatu yang ia anggap bernilai. Konsep kapabilitas kadang juga disebut sebagai kebebasan substantif.²

Dalam penjelasan lebih lanjut, Sen membagi kapabilitas menjadi dua, yakni kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) (Sen 2009, 288-289). Ia mendefinisikan kebebasan kesejahteraan sebagai kemampuan untuk mencapai sesuatu yang sangat menentukan kesejahteraan seseorang (Sen 1985, 201). Sementara pengertian kebebasan kepelakuan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu yang ia anggap bernilai atau ia anggap penting (Sen 1985, 203). Menurut Sen, ide kebebasan kepelakuan terkait erat dengan konsepsi mengenai yang baik (*the conception of the good*) yang dianut seseorang. Ide kebebasan ini mengandaikan status pelaku yang memiliki tanggung jawab atas pilihan-pilihan yang dianggap baik (Sen 1985, 203-204). Sen kadang menyebut tindakan kepelakuan ini sebagai tindakan yang didasarkan pada komitmen. Di dalam tindakan ini, si pelaku memutus hubungan antara pilihan tindakan yang diambil dan motif maksimalisasi kepentingan-diri (Sen 2009, 189). Melalui tindakan ini, ia melihat manusia sebagai pelaku (*doer*) dan juga pemutus/hakim (*judge*), sementara melalui kebebasan kesejahteraan, ia lebih melihat manusia sebagai penerima manfaat (*beneficiary*). Dengan pemahaman ini, ia menilai kebebasan kepelakuan memiliki tujuan yang lebih luas daripada kebebasan kesejahteraan, karena yang terakhir hanya berfokus pada satu tujuan, yakni keuntungan (*advantage*) (Sen 1985, 208).

Melalui kebebasan kepelakuan, Sen mengkritik teori pilihan rasional (*rational choice theory*) yang dipahami sebagai pilihan tindakan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri (*self-interest maximization*). Sebuah pilihan dapat disebut rasional jika dan hanya jika pilihan itu memaksimalkan kepentingan-diri. Jika tindakan rasional dipahami demikian, maka tindakan patriotik, solidaritas dan seluruh tindakan yang didasarkan pada komitmen kepelakuan akan dianggap sebagai tindakan tidak rasional. Ia memahami tindakan komitmen sebagai terputusnya hubungan antara pilihan yang diambil dan motif maksimalisasi kepentingan-diri. Dalam pandangannya, tindakan patriotik, solidaritas dan seluruh tindakan yang didasarkan pada komitmen tidak bisa

² Dalam menjelaskan pengertian kebebasan substantif ini Sen kadang memaknainya sebagai "kebebasan untuk mencapai" (*freedom to achieve*), kadang "kemampuan untuk mencapai" (*the ability to achieve*), dan kadang juga "kebebasan untuk berfungsi" (*freedom to function*).

dinilai sebagai tindakan tidak rasional hanya karena tindakan itu tidak memaksimalkan kepentingan-diri. Karenanya, pengertian rasionalitas pilihan harus dievaluasi. Rasionalitas pilihan tidak ditentukan hanya oleh motif memaksimalkan kepentingan-diri. Dalam hal ini, Sen lebih memahami rasionalitas sebagai pemeriksaan kritis (*critical scrutiny*). Jika pilihan sudah dipertimbangkan secara kritis maka pilihan itu dapat disebut sebagai pilihan rasional, tidak peduli apakah tindakan itu memaksimalkan kepentingan-diri atau tidak.

Pandangan Sen mengenai kebebasan dan kapabilitas merupakan ide yang sangat sentral. Secara teoritis, ide ini kemudian ia kaitkan dengan teori pilihan sosial (*social choice theory*) dan teori pilihan rasional (*rational choice theory*).³ Ada dua hal pokok yang hendak ia tunjukkan dalam hubungan-hubungan ini. Yang pertama, ia menggarisbawahi pentingnya perspektif kebebasan di dalam perumusan pilihan sosial. Yang kedua, ia mengkritik pengertian pilihan rasional yang dipahami hanya sebagai pilihan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri (*self-interest*).⁴ Melalui konsep komitmen kepelakuan, ia menunjukkan bahwa pilihan rasional tidak hanya dipahami sebagai memaksimalkan kepentingan-diri. Pilihan rasional lebih dipahami sebagai pilihan yang sudah diperiksa secara kritis. Dari dua gagasan ini, penulis mencoba untuk mempertegas pandangan etika menurut Sen. Ada dua pertimbangan mengapa pandangan Sen mengenai etika perlu dipertegas. Yang pertama, refleksi Sen sendiri mengenai filsafat sebenarnya berpusat pada filsafat moral atau etika. Salah satu proyek besar filsafatnya adalah mengembalikan ilmu ekonomi ke dalam kerangka etika. Yang kedua, uraian Sen mengenai etika tidak hanya terkait dengan bidang ekonomi, tetapi juga dengan bidang-bidang lain yang lebih luas. Karenanya, melalui disertasi ini penulis mencoba mempertegas rumusan Sen mengenai etika dan relevansinya bagi kehidupan kita saat ini.

Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam disertasi ini adalah:

³ Dua teori ini lebih familiar di dalam ilmu ekonomi, khususnya ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*).

⁴ Kritik dan evaluasi Sen atas pengertian konsep pilihan rasional yang hanya dibatasi pada pemusatan kepentingan-diri banyak diulas dalam Amartya Sen, "Rational Fools," *Philosophy and Public Affairs* 6, (1977b) dan juga dalam Amartya Sen, "The Formulation of Rational Choice." Selain dua artikel itu, catatan terhadap pandangan tersebut juga bisa dibaca dalam Amartya Sen, *On Ethics and Economics* Amartya Sen, *On Ethics & Economics* (Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1988 [1987]), 12-28. Dalam buku itu dijelaskan bahwa perilaku rasional biasa dipahami sebagai konsistensi internal terhadap sebuah pilihan dan sebagai tindakan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri.

- Dari rumusan Amartya Sen mengenai kebebasan dan integrasinya ke dalam teori pilihan sosial, apa ukuran atau kriteria tindakan etis yang rasional yang hendak ia ajukan?
- Mengapa Sen mengkritik keras teori pilihan rasional yang dipahami sebagai maksimalisasi kepentingan-diri? Apa yang hendak ditunjukkan lewat kritik ini terkait dengan pandangannya mengenai etika?

2. Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam disertasi ini, penulis menggunakan pendekatan historis dan kritis. Melalui pendekatan ini, penelitian disertasi ini akan menelusuri konsep yang dikaji secara sistematis dari sumber atau karya yang ditulis oleh tokoh yang telah ditentukan. Dalam hal ini, penelitian mengenai pandangan kebebasan Sen dan integrasinya ke dalam teori pilihan sosial akan dilakukan dengan cara menelusuri karya-karya Sen yang membahas masalah kebebasan dan juga soal integrasi kebebasan ke dalam teori pilihan sosial. Dalam melakukan penelusuran atas teks dan karya Sen mengenai kebebasan, ada begitu banyak buku dan artikel yang membahas masalah ini karena tema kebebasan merupakan salah satu ide pokok dalam pemikiran Sen. Karenanya perlu ada pemilahan secara teliti dalam menentukan teks yang akan menjadi rujukan utama. Dari karya-karya yang pernah dipublikasikan, penulis akan berkonsentrasi pada lima karya sebagai sumber utama. Lima sumber ini kiranya sudah cukup memadai untuk memberikan penjelasan mengenai konsep kebebasan yang diajukan oleh Sen.

Lima karya itu adalah *Rationality and Freedom* (2002), *The Idea of Justice* (2009), *Development as Freedom* (1999), *Inequality Reexamined* (1992) dan artikel Sen yang berjudul "Well-being, Agency and Freedom" yang pernah disampaikan dalam John Dewey Lectures pada 1984 dan diterbitkan dalam *The Journal of Philosophy* tahun 1985. Melalui lima karya ini penulis akan menelusuri pandangan Sen mengenai kebebasan dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam disertasi ini. Setelah melakukan penelusuran atas ide kebebasan menurut Sen, dalam disertasi ini penulis juga akan memberikan tanggapan kritis. Tentu saja, selain lima rujukan ini masih ada beberapa karya Sen lain dan karya para komentator yang akan dijadikan sumber pendukung utama dalam penelitian ini.

3. Tentang Amartya Sen

Amartya K. Sen lahir pada 3 Nopember 1933 di Santiniketan, Bengal barat, India (kini menjadi Bangladesh). Ia menerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi pada tahun 1998 karena kontribusinya bagi ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*). Pada tahun 1950-an setelah melewati pendidikan dasar di Presidency College di Kalkutta untuk belajar ekonomi (1951-1953), ia melanjutkan studi di Trinity College Universitas Cambridge, Inggris. Karya-karya awalnya banyak membahas problem teori pilihan sosial (*social choice theory*). Karya awal yang cukup penting adalah *Collective Choice and Social Welfare* yang terbit tahun 1970. Pada tahun 80-an ia menerbitkan buku *Poverty and Famines*. Melalui karya itu ia menilai bahwa masalah kelaparan terkait erat dengan masalah kapabilitas. Katanya, kelaparan terjadi bukan karena tidak ada komoditas tetapi karena masyarakat tidak bisa mengakses komoditas secara legitim. Masalah akses yang legitim ini terkait dengan kapabilitas seseorang untuk mencapai sesuatu. Karenanya, konsep kapabilitas ini kemudian ia refleksikan lebih dalam dan luas dalam karya-karya berikutnya.

Salah satu karya yang cukup monumental dari pemikiran Sen adalah buku *Development as Freedom* yang terbit pada tahun 1999. Di dalam buku ini Sen mengkritik konsep pembangunan yang biasanya hanya dipahami sebagai pembangunan kesejahteraan, lebih khusus lagi adalah pembangunan yang dipahami sebagai pertumbuhan GDP dan per kapita. Dalam memaknai pembangunan, Sen sangat menggarisbawahi pentingnya pembangunan manusia (*human development*) dalam arti kebebasan (*freedom*). Baginya, hal yang penting bagi manusia bukan hanya aspek kesejahteraan dalam bentuk pendapatan (*income*) tetapi juga kebebasan dan kapabilitas. Ia menilai orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi namun tidak memiliki kebebasan sebagai orang yang cacat (*handicap*). Karenanya, untuk membangun manusia, hal yang diperlukan bukan hanya aspek kesejahteraan tetapi juga jaminan dan kemampuan masyarakat meraih kebebasan. Karya penting lainnya adalah buku *Rationality and Freedom* (2002) dan *The Idea of Justice* (2009). Dua karya ini semakin menegaskan signifikansi kebebasan dalam teori pilihan sosial (*social choice theory*) dan dalam pertimbangan mengenai keadilan (*justice*).

4. Tentang Kebebasan dan Kapabilitas

Sebagaimana sudah ditegaskan di atas, Sen memahami kebebasan dalam dua aspek, yakni aspek kesempatan (*opportunity*) dan aspek proses. Dua aspek ini sekaligus menjadi alasan mengapa kebebasan menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Yang pertama, tulis Sen “kebebasan yang lebih besar akan memberikan kita kesempatan yang lebih besar untuk mencapai tujuan-tujuan kita – sesuatu yang kita anggap bernilai” (Sen 2009, 228). Kebebasan dalam arti ini akan membantu dan memperkuat kemampuan kita untuk menentukan hidup sebagaimana yang kita inginkan. Ia menyebut aspek kebebasan ini sebagai kebebasan yang memerhatikan “kemampuan aktual seseorang untuk mencapai sesuatu yang ia memiliki alasan untuk menilai [hal itu]” (Sen 2004, 10). Kebebasan dalam arti ini kerap ia sebut sebagai kebebasan substantif atau kapabilitas.

Sementara kebebasan dalam aspek proses adalah kebebasan yang memerhatikan proses memilih atau mengambil keputusan itu sendiri. Dalam menentukan sesuatu yang saya anggap baik dan bernilai, saya bebas atau tidak dipaksa. Dengan kebebasan ini “kita...ingin memastikan bahwa kita tidak dipaksa berada dalam kondisi karena paksaan yang didesakkan oleh orang lain” (Sen 2009, 228). Kebebasan dalam aspek proses ini lebih bersifat prosedural atau formal. Pada saat seseorang mengambil keputusan, ia tidak dipaksa oleh pihak lain. Dalam pandangan Sen, dua aspek ini tidak bisa dipisahkan ketika kita menganalisis makna kebebasan. Perhatian pada dua aspek kebebasan ini merupakan langkah moderat di antara dua perspektif kebebasan, yakni kelompok libertarian yang terlalu menekankan prosedur dan kelompok konsekuensialis yang lebih berfokus pada hasil (Sen 1999, 17).

Dari dua aspek kebebasan ini, konsep kapabilitas menjadi salah satu ide utama dalam pemikiran Sen. Dengan pendekatan kapabilitas (*capability approach*), Sen memberikan catatan terhadap pendekatan ekonomi yang melihat kemajuan hidup manusia dari tingkat GDP (*Gross Domestic Product*) dan pendapatan per kapita. Menurutnya, alih-alih mengukur kualitas hidup manusia (*quality of life*) lewat GDP dan pendapatan per kapita, ia lebih melihat ukuran kualitas hidup manusia pada kapabilitas yang dimiliki, yakni sejauh mana seseorang memiliki kemampuan untuk meraih sesuatu yang dianggap bernilai. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk melihat seberapa besar kapabilitas yang dimiliki. Faktor pertama ada pada keragaman pribadi

setiap orang (heterogenitas personal), faktor kedua pada keragaman kondisi lingkungan (dan alam), faktor ketiga pada keragaman kondisi sosial (dan politik), dan ketiga pada perspektif hubungan di dalam komunitas (Sen 2009, 255-256). Perbedaan faktor-faktor ini akan sangat menentukan tingkat kapabilitas seseorang atau masyarakat.

Selanjutnya dalam memahami kapabilitas, Sen mengklasifikasi lebih lanjut menjadi kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*). Di atas sudah ditegaskan bahwa melalui klasifikasi ini Sen hendak menunjukkan bahwa tindakan manusia tidak hanya didorong oleh motif maksimalisasi kesejahteraan. Selain motif kesejahteraan, seorang pelaku juga bisa didorong oleh motif kepelakuan sebagaimana yang ada di dalam tindakan komitmen. Tindakan patriotik dan solidaritas, menurut Sen, adalah contoh dari tindakan yang didasarkan pada komitmen. Dalam tindakan yang didasarkan pada komitmen, pelaku bisa memutus hubungan antara pilihan yang diambil dan motif maksimalisasi kepentingan-diri. Karenanya, masalah penting yang harus diangkat pada bagian berikut adalah mengenai kritik Sen atas teori pilihan rasional yang dalam ekonomi arus utama (*mainstream*) dipahami sebagai maksimalisasi kepentingan-diri.

5. Kritik atas Teori Pilihan Rasional

Di kalangan ekonom arus utama, teori pilihan rasional dipahami sebagai pilihan yang dapat memaksimalkan kepentingan-diri (*self-interest*). Sen mengatakan bahwa dalam perspektif ekonomi, juga dalam politik dan hukum, "orang-orang memilih secara rasional jika dan hanya jika secara masuk akal mereka meraih kepentingan-diri mereka, dan tidak lain" (Sen 2009, 179). Pengertian ini dipengaruhi oleh pemahaman yang diajukan Francis Ysidro Edgeworth yang meringkus pengertian pilihan rasional sebagai pilihan atau tindakan yang didorong hanya oleh motif kepentingan-diri (*self-interest*) (Sen 1977, 317; 2009, 184).⁵ Dalam pemahamannya, motif kepentingan-diri menjadi dasar dalam menilai apakah sebuah pilihan atau tindakan dapat disebut rasional atau tidak rasional. Pengertian pilihan rasional dalam arti ini dikenal sebagai konsep rasionalitas manusia ekonomi (*homo economicus*). Dengan kata lain, menurut Sen, asumsi yang ada di dalam konsep ini adalah sosok manusia yang egois.

⁵ Pengertian pilihan rasional ini menjadi definisi standar dalam teori ekonomi tradisional dan juga teori permainan (*game theory*). Lih. Amartya Sen, "The Formulation of Rational Choice" *The American Economic Review* 84 (1994) 385

Jika pengertian pilihan rasional dipahami demikian, lantas bagaimana kita memahami status tindakan altruistik, apakah tindakan yang didasarkan pada altruisme dapat disebut sebagai rasional? Dalam memahami tindakan semacam itu, ukuran yang dipakai adalah apakah ada motivasi kepentingan-diri di dalamnya atau tidak. Jika ada, maka kita dapat menyebutnya sebagai tindakan atau pilihan rasional. Ada dua contoh tindakan altruistik yang diangkat Sen. Yang pertama adalah tentang orang yang merasa tidak enak hidup dalam masyarakat yang timpang dan kemudian ia melakukan sesuatu yang dapat mengurangi ketimpangan tersebut. Tindakan mengurangi ketimpangan itu juga didorong oleh motif untuk mengurangi rasa tidak enak yang ada di dalam diri pelaku. Menurut Sen, di dalam tindakan altruistik seperti ini sebenarnya masih terkandung motivasi kepentingan-diri sehingga karenanya dapat disebut sebagai tindakan rasional. Sementara orang yang melakukan hal yang sama namun dengan pertimbangan karena kondisi ketimpangan adalah hal buruk bagi masyarakat sehingga ia harus bertindak untuk mengurangi ketimpangan, tidak peduli apakah itu enak atau tidak enak bagi dirinya, maka di dalam tindakan ini tidak lagi terkandung motivasi kepentingan-diri. Pertanyaannya, apakah tindakan seperti ini disebut tidak rasional hanya karena tidak ada motivasi kepentingan-diri di dalamnya? (Sen 2009, 179-180).

Dalam menanggapi persoalan ini Sen berpandangan bahwa alih-alih memahami pilihan rasional sebagai pilihan yang memaksimalkan kepentingan-diri, ia lebih memahaminya sebagai pilihan yang didasarkan pada penalaran yang dapat dipertahankan secara reflektif jika dilakukan pemeriksaan kritis. Hal yang dituntut dalam pilihan rasional adalah adanya pemeriksaan bernalar (*reasoned scrutiny*) atas tujuan, nilai dan prioritas yang akan diambil (Sen 2009, 180; 2004, 4). Sejauh pilihan yang diambil sudah dipertimbangkan secara kritis dan si pelaku sudah mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai pihak, pilihan yang diambil dapat disebut rasional. Tidak ada keharusan bahwa pilihan tersebut akan memaksimalkan kepentingan-diri atau tidak. Tulisnya, "tidaklah bertentangan dengan nalar di dalam keinginan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak sama sekali melayani diri" (Sen 2009, 191). Dengan demikian, rasionalitas pilihan tidak dibatasi pada keharusan untuk memaksimalkan kepentingan-diri sebagaimana yang dipahami dalam konsep "manusia ekonomi". Dalam memilih dan bertindak, setiap orang atau setiap komunitas bisa mendasarkan pada pertimbangan yang tidak didasarkan pada motif kesejahteraan.

Menurut Sen, hal yang ditekankan dalam konsep pilihan rasional adalah soal kecocokan antara pilihan dan pemeriksaan kritis. Rasionalitas pilihan atau pilihan rasional terbuka bagi tindakan yang diabdikan pada kepentingan-diri dan juga yang tidak didasarkan pada kepentingan-diri (Sen 2009, 194-195). Ia mengutip teori pilihan rasional yang dikembangkan Gary Becker yang memahami konsep penalaran dalam pengertian yang lebih luas. Dengan pengertian ini, kita dapat menempatkan tindakan komitmen (*commitment*) sebagai tindakan yang rasional, meski motivasi yang mendorong tindakan itu bukan untuk memaksimalkan kepentingan-diri (Sen 2009, 189-190). Sen memahami tindakan yang didasarkan pada komitmen sebagai tindakan yang memutus hubungan antara motif memaksimalkan kepentingan-diri dan pilihan tindakan yang diambil. Dengan kata lain, dalam tindakan yang didasarkan pada komitmen, seorang pelaku tidak memedulikan apakah tindakan yang diambil akan memaksimalkan kepentingan-dirinya atau tidak.

6. Tentang Teori Pilihan Sosial

Sen mendefinisikan teori pilihan sosial (*social choice theory*) sebagai teori yang memerhatikan hubungan antara preferensi individu dan pilihan sosial (Sen 1977, 53). Hal yang dibahas dan dikaji dalam teori pilihan sosial adalah bagaimana sebuah putusan kolektif (*collective decision*) dihasilkan. Apa yang disebut sebagai putusan kolektif bukanlah putusan satu orang yang kemudian mengatasmakan banyak orang yang ada di dalamnya. Putusan kolektif berarti putusan yang dihasilkan dari begitu banyak orang yang ada di dalam satu kelompok. Hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan pilihan sosial adalah hal-hal apa saja yang dipertimbangkan dan bagaimana hal-hal itu dirumuskan hingga menjadi sebuah putusan kolektif.

Menurut Sen, dalam membuat keputusan kolektif, kita melihat bagaimana keragaman preferensi para individu kemudian menjadi satu keputusan kolektif. Baginya, hal paling penting yang perlu diperhatikan dalam teori pilihan sosial adalah proses peralihan dari begitu banyak preferensi individu menjadi satu keputusan sosial. Sen merumuskan persoalan yang ada dalam teori pilihan sosial melalui pertanyaan berikut: "bagaimana mungkin kita bisa sampai pada putusan agregatif yang meyakinkan mengenai masyarakat (misalnya tentang kesejahteraan sosial, kepentingan publik, masalah kemiskinan dan lain-lain), dari beragam preferensi, minat dan kesulitan

individu yang berbeda-beda yang ada dalam masyarakat?⁶ Dan “bagaimana kita mendapatkan dasar rasional dalam membuat penilaian agregatif, seperti masyarakat yang lebih suka ini daripada itu, atau masyarakat lebih memilih ini daripada itu, dan [bagaimana] putusan itu dianggap benar secara sosial?” (Sen 2004, 66).

Dari semua pertanyaan mengenai teori pilihan sosial, pada akhirnya kita harus bertanya apakah yang disebut sebagai pilihan sosial yang masuk akal (*reasonable*) itu benar-benar mungkin? Jika memang pilihan sosial yang masuk akal itu mungkin, kita dapat bertanya lebih jauh bagaimana teori pilihan sosial mengakomodasi keragaman preferensi yang ada di dalamnya. Dalam rumusan Sen, “bagaimana kita bisa mengakomodasi hak dan kebebasan setiap orang [yang ada di dalamnya] dengan memberikan pengakuan yang layak terhadap preferensi mereka?” (Sen 2004, 67). Seluruh pertanyaan yang terkait dengan kemungkinan pilihan sosial ini, dalam pandangan Sen, menjadi pertanyaan penting yang diajukan dalam teori pilihan sosial.

Pada saat merumuskan satu putusan kolektif, bagaimana kita harus menyikapi keragaman preferensi yang begitu banyak? Hampir pasti, putusan sosial yang dicapai tidak sepenuhnya sesuai dengan preferensi setiap individu yang ada di dalamnya. Sen menyebut kondisi ini sebagai “ketidakmungkinan liberal Paretian” (*the impossibility of the Paretian liberal*). Dengan istilah ini ia ingin menunjukkan adanya konflik antara kebebasan dan putusan kolektif yang dihasilkan. Konflik itu terjadi karena kita tidak mungkin mampu menghasilkan satu putusan sosial yang bulat (*unanimity*) dalam arti disepakati oleh semua dan tidak bertentangan sama sekali dengan preferensi para individu yang ada di dalamnya.

Dalam pandangan Sen, model pilihan sosial tradisional cenderung memerhatikan prinsip Pareto dan kurang memerhatikan kebebasan.⁷ Model pilihan sosial seperti itulah

⁶ Pertanyaan mengenai apakah sebuah pilihan sosial itu mungkin adalah pertanyaan yang sangat mendasar dalam teori pilihan sosial. Nitzan dalam bukunya, *Collective Preference and Choice*, mengatakan bahwa sebuah pilihan sosial yang betul-betul memuaskan sebenarnya tidak ada. Masalahnya kemudian, putusan kolektif itu sendiri adalah sesuatu niscaya di dalam masyarakat. Setiap kelompok masyarakat dihadapkan pada keharusan membuat keputusan kolektif. Karenanya meski ada perbedaan pandangan dan kepentingan antar-anggota masyarakat, kita tetap harus membuat aturan untuk menghasilkan sebuah putusan sosial. Lih. Shmuel Nitzan, *Collective Preference and Choice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 9-11, dan 35-36.

⁷ Prinsip Pareto adalah salah satu prinsip penting di dalam ekonomi kesejahteraan. Ada banyak teorema dan kondisi optimalitas yang diformulasikan dengan merujuk pada prinsip ini. Menurut Kwang Ng, satu kondisi dapat disebut sesuai dengan prinsip Pareto jika kondisi itu membuat sebagian orang lebih baik tanpa membuat sebagian yang lain lebih buruk. Yang dimaksud dengan lebih baik di sini adalah

yang menciptakan konflik antara kebebasan dan prinsip Pareto atau yang kemudian disebut sebagai Teorema Ketidaktunggalan. Untuk mengatasi konflik itu, ia menegaskan bahwa pilihan sosial harus mengakomodasi kebebasan (Sen 2004, 93). Proses akomodasi ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan beragam kepentingan anggota yang ada di dalamnya.

Secara teknis, ada tiga kondisi yang harus dipertimbangkan di dalam teori pilihan sosial. Tiga kondisi itu adalah kondisi Pareto (kemudian disingkat menjadi kondisi P), kondisi kebebasan (kondisi L /liberty) dan kondisi area yang tidak dibatasi (kondisi U /unrestricted domain) (Sen 1976b, 218). Yang dimaksud dengan prinsip Pareto (kondisi P) adalah bahwa "jika setiap orang dalam masyarakat lebih menyukai satu kondisi sosial tertentu dibanding kondisi yang lain, maka pilihan itu harus diambil untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan" (Sen 1976b, 217). Melalui prinsip ini, jika kebanyakan orang dalam satu kelompok lebih memilih x dibanding y , maka secara sosial dan untuk kebaikan sosial, x harus dipilih. :

Sementara yang dimaksud dengan kebebasan atau kondisi L adalah bahwa setiap individu sejatinya memiliki ruang pribadi yang harus diakui. Menurut Sen, di dalam ruang itu terkandung preferensinya mengenai sesuatu. Melalui kondisi L kita menuntut agar preferensi seorang pribadi harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan preferensi sosial (Sen 1983, 7). Dalam merumuskan pilihan sosial, kita harus menerima fakta bahwa di dalam satu kolektivitas terdapat individu yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Pandangan-pandangan itu harus menjadi bagian dari pertimbangan kita dalam merumuskan putusan bersama (Sen 1976b, 217). Tuntutan untuk memerhatikan dan mempertimbangkan preferensi para anggota yang ada di dalamnya merupakan upaya Sen untuk mengakomodasi kebebasan dalam putusan sosial.

Sementara yang dimaksud dengan kondisi U atau area yang tidak dibatasi (*unrestricted domain*) adalah keharusan untuk tidak membatasi pihak-pihak yang

dalam arti kesejahteraan (*welfare*). Ada banyak ekonom yang keberatan dengan prinsip ini karena prinsip ini tidak memerhatikan aspek distribusi. Misalnya jika sebuah kebijakan dapat menaikkan pendapatan kelompok yang lebih kaya tanpa mengurangi pendapatan kelompok yang lebih miskin, maka dari perspektif prinsip Pareto tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan optimalitas Pareto. Lih. Yew-Kwang Ng, *Welfare Economics: Towards a More Complete Analysis* (New York: Pelgrave Macmillan, 2004), 26-27.

berkepentingan dengan masalah yang sedang dirumuskan. Sen menegaskan bahwa dalam merumuskan putusan sosial kita harus mengikutsertakan seluruh preferensi individu yang secara rasional dimungkinkan untuk terlibat (Sen 1976b, 240). Dalam merumuskan putusan kolektif, kita dituntut untuk terbuka pada setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan masalah yang sedang dibahas. Namun menurut Sen, tentu saja, dalam merumuskan putusan sosial kita tidak akan mampu memuaskan tuntutan kondisi U ini secara maksimal. Putusan sosial yang dihasilkan juga tidak akan memuaskan dua kondisi sebelumnya, yakni tuntutan Pareto dan tuntutan kebebasan secara utuh (Sen 1983, 8).

7. Pilihan Sosial Berbasis-Kebebasan

Sebagaimana sudah ditegaskan di atas, dalam teori pilihan sosial tradisional ada kecenderungan untuk menjadikan nilai manfaat dan kesejahteraan sebagai pertimbangan utama sehingga berpotensi mengabaikan nilai kebebasan. Kecenderungan ini didasarkan pada pandangan yang memahami motif maksimalisasi kepentingan-diri (*self-interest*) sebagai pengertian pilihan rasional (*rational choice*). Implikasi dari kecenderungan ini bisa dilihat dalam perumusan pilihan sosial yang ada dalam kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Hal yang dipertimbangkan di dalam kebijakan publik pada umumnya adalah sejauh mana kebijakan itu dapat memaksimalkan kesejahteraan dan manfaat bagi kelompok terbanyak. Jika pilihan sosial mendasarkan diri pada pertimbangan ini maka ada kemungkinan kebijakan yang dihasilkan akan mengabaikan hak dan kapabilitas kelompok masyarakat yang lebih kecil atau mereka yang tidak terlalu mementingkan nilai manfaat dan kesejahteraan.

Pada titik inilah Sen melihat masalah serius dalam teori pilihan sosial tradisional bagi upaya perlindungan kebebasan dan perluasan kapabilitas, khususnya kebebasan dan kapabilitas kelompok minoritas. Untuk mengatasi masalah ini ia kemudian mencoba memodifikasi teori pilihan sosial tradisional agar tidak berbenturan dengan upaya perlindungan kebebasan. Dalam memodifikasi teori ini, ada dua hal penting yang ia lakukan, yang pertama adalah melalui kritik atas teori pilihan rasional (*rational choice theory*) dan yang kedua melalui panduan praktis mengenai pilihan sosial yang pro pada kebebasan. Dua langkah Sen ini akan diuraikan dalam penjelasan berikut.

Kritik atas teori pilihan rasional (*rational choice theory*) sebagaimana sudah dijelaskan di atas menjadi tahap penting dari upaya modifikasi teori pilihan sosial yang diajukan Sen agar tidak berkonflik dengan nilai kebebasan. Ia mengkritik keras teori pilihan rasional yang dipahami dalam kerangka manusia ekonomi. Melalui teori ini, sebagaimana sudah diuraikan di atas, sebuah pilihan dapat disebut rasional jika pilihan itu dapat memaksimalkan kepentingan-diri, keuntungan dan kesejahteraan bagi si pelaku. Dalam kaca mata manusia ekonomi, tindakan rasional manusia hanya bisa dipahami lewat motif memaksimalkan kepentingan-diri. Dengan kata lain, seseorang tidak mungkin bertindak secara rasional kecuali untuk memaksimalkan kepentingannya.

Untuk mengevaluasi pandangan manusia ekonomi di atas, pertama-tama Sen membedakan dua macam tindakan, yakni tindakan egoistik dan tindakan altruistik. Di dalam tindakan egoistik, kita memang bisa melihat dengan jelas pengejawantahan model manusia ekonomi yang hanya mengejar kepentingan-diri. Seseorang hanya bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya, tidak lain. Dalam praktik ekonomi secara umum, kita bisa melihat bagaimana para pelaku ekonomi mempraktikkan model tindakan egoistik. Namun tindakan egoistik bukan satu-satunya model tindakan manusia. Seorang manusia juga bisa bertindak secara altruistik. Dalam menganalisis tindakan altruistik, ia membedakan secara tajam dua macam tindakan altruistik. Yang pertama adalah tindakan yang didasarkan pada simpati dan yang kedua tindakan yang didasarkan pada komitmen. Di dalam tindakan simpati, meski tindakan pelaku tampaknya diarahkan untuk kepentingan orang lain, namun kepentingan-diri si pelaku sebenarnya masih dapat dilacak dalam tindakan ini. Misalnya, seseorang yang merasa tidak enak melihat tetangganya kelaparan sehingga ia kemudian memberikan bantuan makanan agar rasa tidak enak yang dirasakan hilang, adalah contoh kasus simpati. Di dalam tindakan ini, meski ada perhatian yang terarah pada orang lain, namun motif yang mendasari tindakan itu tetap kepentingan-diri, yakni menghilangkan rasa tidak enak yang dialami si pelaku.

Dalam pandangan Sen, jika kita berhenti pada tindakan altruistik yang didasarkan pada simpati, kita masih melihat kebenaran klaim kepentingan-diri sebagai prinsip pertama (*first principle*) di dalam tindakan manusia. Namun jika kita melihat jenis tindakan altruistik kedua, yakni tindakan yang didasarkan pada komitmen, menurut Sen, kita akan melihat adanya tindakan yang tidak lagi memaksimalkan

kepentingan-diri. Ia memahami tindakan komitmen sebagai terputusnya hubungan antara tindakan yang diambil dan motif memaksimalkan kepentingan-diri. Tindakan seorang pembela tanah air (patriot) yang rela mengorbankan harta dan hidupnya adalah contoh di mana tindakan itu murni diarahkan untuk kehidupan yang lebih luas, yakni kemerdekaan bangsa, bukan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya.

Dalam pandangan Sen, melalui tindakan yang didasarkan pada komitmen, kita menemukan kemungkinan tindakan rasional yang tidak harus memaksimalkan kepentingan-diri. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, ia lebih memahami rasionalitas pilihan pada adanya proses pemeriksaan kritis (*critical scrutiny*). Sebuah tindakan dapat disebut rasional jika sudah diperiksa secara kritis, meski tidak memaksimalkan kepentingan-diri. Dengan memasukkan konsep komitmen dan kritik atas teori pilihan rasional, Sen menegaskan satu hal penting, yakni tentang pluralitas nilai yang dapat dipertimbangkan setiap orang ketika memilih. Ia menulis bahwa "Nilai-nilai selain capaian kesejahteraan bisa saja sangat memengaruhi penilaian seseorang dalam memilih" (Sen 1985, 203). Secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa kesejahteraan/manfaat bukan satu-satunya nilai yang dikejar dalam tindakan yang diambil oleh seorang pelaku.

Dari kritik Sen atas teori pilihan rasional, ada tiga konsekuensi penting yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, kritik ini tentu tidak dipahami sebagai penolakan atas tindakan yang didasarkan pada kepentingan-diri. Ada begitu banyak contoh yang ditunjukkan dari klaim kepentingan-diri sebagai prinsip pertama (*first principle*) dalam tindakan manusia. Hal yang hendak ditolak adalah kecenderungan untuk menjadikan motif kepentingan-diri sebagai satu-satunya penjelasan rasional untuk memahami tindakan manusia. Tepatnya, apa yang diajukan Sen sebenarnya merupakan koreksi atas pandangan yang melihat tindakan manusia hanya bisa dipahami lewat motif memaksimalkan kepentingan-diri. Terlebih ketika pandangan ini kemudian didaku sebagai ukuran untuk memahami rasionalitas pilihan. Sen mengoreksi pandangan ini dengan menunjukkan bahwa ada pilihan tindakan yang tidak memaksimalkan kepentingan-diri namun kita tetap bisa memahaminya sebagai tindakan rasional sejauh tindakan itu sudah diperiksa secara bernalar dan kritis. Dengan demikian, memaksimalkan kepentingan-diri bukanlah ukuran untuk memahami rasionalitas sebuah pilihan.

Yang kedua, jika kita menerima pengertian rasionalitas tindakan sebagai proses pemeriksaan kritis atas tujuan, nilai dan prioritas meski tidak memaksimalkan kepentingan-diri, manfaat dan kesejahteraan, maka kita dapat memasukkan rasionalitas komitmen ke dalam pertimbangan pilihan sosial. Dalam argumen mengenai kontribusi positif sistem demokrasi bagi kesejahteraan, Sen mengkritik tesis Lee yang menolak demokrasi dan hak sipil-politik bagi upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ia menunjukkan bahwa jika dilihat secara komparatif, pemerintahan demokratis justru memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menciptakan kesejahteraan dibanding pemerintahan otoriter. Itu berarti bahwa perhatian pada hak dan kebebasan memiliki implikasi positif bagi terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat. Masalahnya kemudian bagaimana jika upaya perlindungan kebebasan tidak memberikan dampak positif bagi maksimalisasi kesejahteraan, keuntungan dan manfaat?

Di sini kita melihat relevansi rasionalitas komitmen yang diajukan Sen bagi pertimbangan pilihan sosial. Jika kita menerima upaya perlindungan kebebasan hanya jika upaya itu bisa memaksimalkan kesejahteraan, lantas bagaimana jika tidak memaksimalkan kesejahteraan? Upaya untuk melindungi kebebasan dan memperluas kapabilitas tidak selalu dilakukan hanya jika upaya itu memberikan kontribusi positif bagi maksimalisasi kesejahteraan. Tuntutan agar pemerintah melindungi hak-hak dasar kelompok minoritas dan melindungi lingkungan dari kerusakan akibat limbah perusahaan bisa saja memberikan dampak positif bagi peluang investasi asing di dalam negeri. Namun, jika pun hal ini tidak memberikan dampak positif bagi maksimalisasi keuntungan dan kesejahteraan, perlindungan hak-hak dasar kelompok minoritas dan perlindungan lingkungan hidup tetap harus dilakukan oleh pemerintah. Upaya ini dipahami sebagai komitmen yang tidak harus terkait dengan maksimalisasi kesejahteraan. Apakah pilihan sosial semacam ini dianggap tidak rasional? Sejauh kita sudah mempertimbangkan mengenai nilai, tujuan dan prioritas pilihan itu secara kritis kita dapat menyebut pilihan tindakan itu sebagai pilihan rasional meski tidak memaksimalkan kepentingan-diri.

Konsekuensi ketiga dari kritik Sen, sebagaimana sudah disinggung di atas, adalah koreksi atas pandangan yang menganggap kesejahteraan/manfaat sebagai satu-satunya nilai yang mendorong tindakan manusia. Sen menunjukkan bahwa ada begitu

banyak nilai yang dikejar oleh seorang pelaku. Kemajemukan atau pluralitas nilai yang dipertimbangkan oleh setiap pelaku adalah hal yang harus dilihat untuk memahami tindakan manusia. Nilai yang dikejar bisa saja tidak terkait sama sekali dengan motif maksimalisasi kepentingan-diri. Tindakan seseorang yang hendak berpiknik namun kemudian memilih menolong tetangganya yang sakit sehingga ia harus membatalkan rencana pikniknya bisa disebut sebagai tindakan yang didasarkan pada komitmen. Si pelaku terpanggil untuk bertanggung jawab atas kondisi tetangganya yang sakit. Pilihan itu tidak terkait sama sekali dengan motif agar tetangga itu juga mau menolongnya pada saat ia membutuhkan pertolongan. Dengan kata lain, pilihan tindakan itu diambil tanpa motif maksimalisasi kepentingan-diri. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan alasan memilih tindakan, manusia tidak hanya mempertimbangkan nilai manfaat dan kesejahteraan. Ada banyak nilai yang dapat dipertimbangkan selain nilai manfaat dan kesejahteraan.

Langkah kedua yang dilakukan Sen dalam upaya mengintegrasikan kebebasan ke dalam pilihan sosial adalah dengan memberikan panduan praktis tentang bagaimana seharusnya pilihan sosial dibuat. Menurut Sen, salah satu realitas yang dihadapi ketika kita merumuskan pilihan sosial adalah kenyataan bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hal yang dianggap penting dan bernilai. Ia menyebut kenyataan ini sebagai kemajemukan preferensi individu. Jumlah preferensi di dalam satu kelompok bisa sama dengan jumlah individu yang ada di dalamnya. Lantas bagaimana sebuah putusan kolektif yang legitim bisa dilahirkan dari preferensi yang begitu banyak dan beragam? Dalam mengurai persoalan ini, Sen menekankan prinsip perumusan pilihan sosial yang memerhatikan kebebasan dan kapabilitas. Ada dua hal yang ditekankan dalam prinsip ini. Yang pertama, dalam merumuskan pilihan sosial, setiap pihak yang berkepentingan harus diberi ruang untuk berpartisipasi. Dengan kata lain harus ada partisipasi publik yang bebas dalam merumuskan putusan kolektif. Yang kedua, hasil yang dicapai juga harus menghormati kebebasan setiap orang dan dapat semakin memperluas kapabilitas para anggota yang ada di dalamnya. Pilihan sosial atau kebijakan publik yang dihasilkan tidak melangkahi hak dasar kelompok yang lebih kecil.

Dalam hidup bersama, baik itu yang bersifat formal atau non-formal, kita selalu dihadapkan pada upaya untuk membuat putusan kolektif. Kemampuan seseorang untuk

mencapai sesuatu yang ia anggap baik tidak sepenuhnya ditentukan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh banyak faktor eksternal. Salah satu faktor terpenting itu ada pada putusan kolektif atau pilihan sosial. Keinginan seseorang untuk hidup sehat atau keinginan untuk melaksanakan ibadah sebagaimana yang diyakini, misalnya, bergantung pada sejauh mana komitmen pemerintah melindungi kesehatan dan menjamin hak beribadah semua warga negara. Kebijakan politik yang tidak mendukung upaya hidup sehat atau komitmen politik yang rendah terhadap jaminan kebebasan beribadah akan berdampak pada susutnya kesempatan seseorang merealisasikan harapannya. Dalam pandangan Sen, kapabilitas seseorang untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai, tidak bisa tidak, akan bersinggungan langsung dengan pilihan sosial (*social choice*).

Apa yang dianggap bernilai oleh satu orang belum tentu juga dianggap bernilai oleh pihak lain. Preferensi pribadi belum tentu cocok dengan preferensi kolektif. Sen menyebut kondisi seperti ini sebagai konflik antara kebebasan dan pilihan sosial. Pertimbangan pilihan sosial yang hanya didasarkan pada suara mayoritas dapat berpotensi melangkahi hak dan kebebasan dasar seseorang. Menurutnya, kecenderungan konflik antara kebebasan dan pilihan sosial terjadi pada teori pilihan sosial tradisional. Karenanya, kita memerlukan sebuah panduan praktis dan sekaligus etis yang bisa membatasi ekspansi pilihan sosial yang berorientasi pada suara mayoritas dan motif kesejahteraan/manfaat agar tidak melangkahi hak dan kebebasan dasar sebagian anggotanya. Panduan ini menjadi prinsip yang harus diperhatikan dalam perumusan pilihan sosial.

Dengan panduan ini, pilihan sosial tidak lagi didasarkan pada suara terbanyak yang biasanya hanya terarah pada nilai manfaat dan kesejahteraan. Dalam pandangan Sen, pilihan sosial juga harus memerhatikan nilai kebebasan dan hak dasar para anggota yang ada di dalamnya. Kebebasan dan hak dasar tidak bisa dilangkahi hanya karena mayoritas menghendaki pilihan itu. Dengan pandangan ini Sen mencoba merumuskan pilihan sosial yang terintegrasi dengan nilai kebebasan. Penulis menyebut model modifikasi pilihan sosial yang diajukan Sen ini sebagai pilihan sosial berbasis-kebebasan atau *liberty-based social choice*. Modifikasi lewat panduan praktis ini merupakan upaya Sen agar pilihan sosial tidak berbenturan dengan upaya perlindungan kebebasan. Melalui model ini ia juga mencoba mengajukan rumusan kesepakatan

kolektif yang memiliki legitimasi politik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

8. Kebebasan dan Kapabilitas sebagai Kriteria Etis

Setelah menguraikan langkah Sen mengintegrasikan kebebasan ke dalam teori pilihan sosial yang kemudian menjadi pilihan sosial berbasis-kebebasan (*liberty-based social choice*), selanjutnya penulis akan merumuskan jawaban atas pertanyaan utama yang diajukan dalam disertasi ini, yakni mengenai ukuran tindakan etis yang diajukan Sen. Apa ukuran atau kriteria untuk menilai sebuah tindakan sebagai baik atau tidak baik secara etis? Yang kedua, apa motif yang hendak ditegaskan Sen lewat kritik terhadap teori pilihan rasional bagi pandangannya mengenai etika? Dari seluruh pandangan dan argumen yang sudah diajukan, menurut penulis, rumusan mengenai tindakan etis dalam pandangan Sen diukur dari seberapa jauh sebuah tindakan memberikan perlindungan kebebasan dan perluasan kapabilitas. Perlindungan kebebasan dan perluasan kapabilitas menjadi kriteria untuk menilai apakah tindakan yang dipilih itu dapat dinilai baik secara etis. Perlindungan kebebasan dipahami sebagai penolakan terhadap segala bentuk paksaan yang dilakukan satu pihak terhadap pihak lain. Sementara perluasan kapabilitas dipahami sebagai penguatan kemampuan seseorang atau masyarakat untuk mencapai sesuatu (*the ability to achieve*) yang dianggap bernilai. Rumusan mengenai kriteria tindakan etis menjadi perspektif yang harus diintegrasikan ke dalam hubungan antar-sesama (interaksi sosial) dan dalam perumusan kebijakan publik yang dibuat pemerintah.

Menurut penulis, karena hal yang menjadi ukuran dalam etika ini adalah kebebasan dan kapabilitas (kebebasan dalam aspek kesempatan) maka pandangan etika ini disebut sebagai pandangan etika yang berbasis-kebebasan. Sebuah tindakan dapat dinilai baik secara etis jika memerhatikan perlindungan kebebasan dan perluasan kapabilitas. Perspektif kebebasan ini diorientasikan dalam hubungan antar-sesama atau dalam interaksi sosial dan juga dalam perumusan kebijakan publik. Dengan kata lain, kriteria etis yang diajukan Sen memiliki sifat sosial atau terkait dengan masalah hidup bersama. Karenanya penulis kemudian menyebut pandangan etika ini sebagai etika sosial berbasis-kebebasan (*liberty-based social ethics*).

Hal yang juga perlu ditegaskan dalam pandangan etika Sen adalah perhatian pada keragaman ketidakmampuan (deprivasi kapabilitas) yang ada di dalam masyarakat. Melalui pendekatan kapabilitas, kita dituntut untuk melihat masalah deprivasi kapabilitas yang dihadapi dan jalan keluar yang dapat diberikan. Dengan kata lain, kita tidak dapat menyamaratakan kondisi setiap orang begitu saja. Pilihan sosial yang diambil harus sesuai dengan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, perumusan pilihan sosial berbasis-kebebasan, harus **memberikan perhatian besar** pada realitas keragaman masalah dan deprivasi kapabilitas yang ada dalam masyarakat.

Sementara lewat kritik atas teori pilihan rasional, Sen hendak memberikan pendasaran mengenai tindakan etis yang didasarkan pada komitmen. Rasionalitas sebuah pilihan tidak diukur pada sejauh mana pilihan tindakan itu dapat memaksimalkan kepentingan-diri. Pilihan tindakan yang didasarkan pada komitmen juga bisa disebut rasional meski tindakan itu tidak memaksimalkan kepentingan-diri. Ia lebih memahami rasionalitas sebuah pilihan pada sejauh mana pilihan itu sudah diperiksa secara kritis, bukan pada sejauh mana pilihan itu bisa memaksimalkan kepentingan-diri. Karenanya, melalui kritik ini Sen menegaskan bahwa tindakan tindakan etis yang didasarkan pada komitmen dapat disebut rasional meski kontradiktif dengan motif memaksimalkan kepentingan-diri.

Dalam pilihan tindakan yang didasarkan pada pemeriksaan kritis (*critical scrutiny*), hal yang ditekankan bukan hanya nilai manfaat-kesejahteraan tetapi juga nilai-nilai lain seperti hak dan kebebasan. Di dalam tindakan komitmen seperti solidaritas dan patriotisme, seorang pelaku memang tidak memaksimalkan nilai manfaat, kesejahteraan dan kepentingan-dirinya, namun kita bisa menyebutnya sebagai tindakan rasional. Jika pelaku sudah mempertimbangkan secara kritis mengenai nilai kebebasan dan kapabilitas yang diupayakan dalam tindakan yang didasarkan pada komitmen kita dapat menyebutnya sebagai tindakan rasional. Dengan pemahaman ini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan kritis, ada banyak nilai yang dapat dipertimbangkan oleh manusia.

Dengan penegasan ini, Sen sebenarnya telah memberikan pemahaman dasar bahwa rasionalitas tindakan tidak diukur pada sejauh mana ia dapat memaksimalkan kepentingan-diri melainkan pada sejauh mana ia sudah diperiksa secara kritis. Tindakan

yang didasarkan pada komitmen dapat disebut rasional sejauh sudah dipertimbangkan secara kritis. Dengan demikian, kritik Sen pada teori pilihan rasional, menurut penulis berfungsi untuk menopang dasar rasionalitas tindakan etis yang didasarkan pada komitmen. Ia memahami komitmen sebagai tindakan yang tidak lagi didorong oleh motif kepentingan-diri. Ide mengenai komitmen terkait dengan tanggung jawab seseorang sebagai pelaku yang memiliki kemampuan untuk mengatasi atau mengurangi ketidakbebasan yang dialami oleh pihak lain.

Dari rumusan di atas maka pandangan Sen mengenai etika dapat ditegaskan sebagai berikut:

Sebuah tindakan dapat dinilai baik secara etis jika tindakan itu memiliki perspektif pada perlindungan kebebasan dan perluasan kapabilitas. Sementara dengan mengkritik teori pilihan rasional, ia menegaskan bahwa rasionalitas pilihan tidak diukur pada maksimalisasi kepentingan-diri tetapi pada pemeriksaan kritis. Karenanya tindakan etis yang didasarkan pada komitmen dapat disebut rasional sejauh sudah diperiksa secara kritis.

Apakah dengan pengelasan ini Sen mengeliminasi tindakan yang memiliki motif maksimalisasi kepentingan-diri dari kriteria tindakan etis? Penulis berpendapat bahwa Sen tidak mengeliminasi motif maksimalisasi kepentingan-diri dari kriteria tindakan etis. Tindakan seorang pelaku bisa masuk dalam kategori etis meski memiliki motif maksimalisasi kepentingan-diri. Seorang warga yang mencoba menggerakkan warga lain untuk membersihkan lingkungan rumah dari sampah pada saat menjelang musim hujan tentu saja terkandung motif maksimalisasi kepentingan-diri dalam tindakan itu. Dengan menggerakkan warga lain untuk membersihkan lingkungan masing-masing, ia dan semua warga yang ada di sekitarnya dapat terhindar dari banjir. Dalam tindakan semacam ini, meski terkandung motif maksimalisasi kepentingan-diri juga jelas terkandung motif etis yakni perluasan kapabilitas.

Begitu juga dalam tindakan seorang pejuang hak azasi yang membela hak kelompok minoritas. Ia melakukan pembelaan terhadap kelompok minoritas dari tindakan pengekangan dan pembatasan hak dasar dengan motif maksimalisasi kepentingan-diri di dalamnya. Di dalam tindakan itu, ia memang melakukan pembelaan terhadap kelompok lain, namun pada saat yang sama, tindakan itu juga didorong oleh kekhawatiran pelaku jika hal itu menimpa dirinya atau kelompoknya. Melalui

pembelaan itu, ia mencoba menghentikan tindakan negara yang bisa mengancam hak-hak dasar warga, termasuk dirinya. Dalam hal ini kita bisa melihat motif kepentingan-diri di dalam tindakan yang dari permukaan merupakan tindakan diarahkan pada orang lain. Meski memiliki motif kepentingan-diri, sikap semacam ini bisa dilihat sebagai tindakan etis karena memberikan perhatian pada perlindungan kebebasan. Dengan demikian hal yang hendak digarisbawahi dalam kriteria tindakan etis menurut Sen di atas memang bukan soal adanya motif maksimalisasi kepentingan-diri atau tidak, tetapi pada sejauh mana sebuah tindakan melindungi kebebasan dan memperluas kapabilitas. Jika sebuah tindakan dapat melindungi kebebasan dan memperluas kapabilitas, kita dapat menyebutnya sebagai tindakan etis, apakah dengan motif maksimalisasi kepentingan-diri atau tidak dengan motif maksimalisasi kepentingan-diri.

9. Penutup

Apa yang hendak ditegaskan oleh Sen lewat integrasi kebebasan ke dalam teori pilihan sosial? Menurut penulis, ada dua gagasan pokok yang hendak ditegaskan lewat integrasi kebebasan ke dalam teori pilihan sosial dan dua gagasan ini saling terkait. Pertama, dengan memasukkan kebebasan ke dalam pertimbangan pilihan sosial, masyarakat atau pemerintah dituntut untuk tidak hanya mempertimbangkan nilai manfaat dan kesejahteraan pada saat merumuskan putusan kolektif. Hal yang dianggap bernilai tentu saja bukan hanya nilai manfaat dan kesejahteraan tetapi juga nilai hak dan kebebasan. Sen melihat kecenderungan untuk menjadikan manfaat-kesejahteraan sebagai pertimbangan utama dalam pilihan sosial bisa berdampak pada pengabaian hak dan kebebasan kelompok minoritas di dalam masyarakat. Praktik pilihan sosial tidak boleh dibiarkan seperti itu karena akan membuatnya semakin menjauh dari norma etis yang seharusnya memberikan ruang pada cakrawala kepentingan dan nilai yang lebih luas. Ada begitu banyak hal yang dianggap bernilai oleh manusia, dan menurut Sen di antara nilai yang sangat penting itu adalah kebebasan. Dengan demikian, melalui integrasi ini Sen berupaya menekankan signifikansi nilai kebebasan manusia di dalam perumusan pilihan sosial.

Kedua, masih terkait dengan upaya di atas, dengan memasukkan nilai kebebasan ke dalam teori pilihan sosial. Sen juga hendak mengembalikan posisi manusia sebagaimana adanya. Manusia bukan hanya mahluk pengejar manfaat-kesejahteraan

tetapi juga makhluk yang memiliki orientasi pada nilai tanggung jawab yang tidak terkait dengan maksimalisasi manfaat-kesejahteraan. Pandangan kita mengenai manusia bukan hanya sebagaimana yang dipersepsi dalam kerangka manusia ekonomi (*homo economicus*), tetapi juga manusia yang memiliki perspektif mengenai nilai yang sangat beragam. Manusia memiliki cakrawala yang cukup luas mengenai nilai sehingga kita tidak dapat meringkusnya hanya pada satu cakrawala nilai manfaat-kesejahteraan. Bagi penulis, dengan memberikan perhatian pada keragaman nilai yang dianggap baik. Sen mencoba menampilkan gambaran manusia yang lebih utuh, yang tidak diringkus hanya pada satu konsep tertentu.

Dengan dua gagasan ini penulis menilai bahwa pemikiran Sen mengenai kebebasan dan integrasinya ke dalam teori pilihan sosial bukan semata kritik atas teori dan praktik ekonomi. Pandangan Sen yang penulis uraikan dalam disertasi ini memiliki relevansi yang sangat penting bagi pemikiran filsafat, khususnya bagi filsafat moral dan filsafat manusia. Melalui tema kebebasan dan teori pilihan sosial, ia mencoba merefleksikan bidang yang menjadi latar belakangnya, yakni bidang ekonomi, untuk diangkat ke aras yang lebih tinggi. Ia melihat ada masalah serius dalam kecenderungan untuk memahami perilaku manusia hanya dalam kerangka manusia ekonomi. Terlebih ketika perilaku itu justru harus mengorbankan dimensi manusia yang lebih mendasar, yakni kebebasan. Karenanya, proyek besar pemikiran Sen sejatinya, menurut penulis, adalah untuk menegaskan kembali makna dan tujuan hidup manusia secara sosial, yakni melindungi kebebasan. Kebebasan manusia tidak boleh dikorbankan atas nama apapun.

Lantas apa kebaruan yang dapat penulis hadirkan dari penelitian disertasi ini sementara sudah banyak karya yang ditulis mengenai Amartya Sen? Dalam pengamatan penulis, meski sudah banyak karya ditulis mengenai pemikiran Sen, namun pertanyaan dan penegasan mengenai kriteria etis yang diajukan Sen, khususnya dalam konteks integrasinya ke dalam teori pilihan sosial (*social choice theory*) dan kritiknya terhadap teori pilihan rasional (*rational choice theory*) belum pernah penulis dapatkan. Karenanya, kebaruan dari tesis yang penulis ajukan dalam disertasi ada pada eksposisi mengenai kriteria etis menurut Sen dalam interaksi sosial dan juga dalam perumusan kebijakan publik. Kriteria itu berjangkar pada perlindungan kebebasan dan perluasan kapabilitas.

Kemudian, apakah ada relevansi yang cukup penting dari tesis ini bagi kita di Indonesia? Penelitian disertasi ini pada dasarnya adalah sebuah penelitian filsafat. Di dalam penelitian filsafat, materi yang dibahas adalah pemikiran atau ide yang dianalisis secara abstrak sehingga ada kesan tidak berjejak di atas realitas konkret. Tetapi, penulis perlu tegaskan, meski penelitian ini adalah penelitian mengenai pemikiran, sebuah pemikiran tetap berakar pada realitas konkret di dalam kehidupan. Karenanya, jika perlu ditegaskan mengenai relevansinya bagi kehidupan kita di Indonesia, tentu saja ada relevansi yang dapat ditarik. Menurut penulis, paling tidak ada dua hal yang bisa dilihat sebagai relevansi bagi kita di Indonesia. Pertama, melalui etika sosial berbasis-kebebasan, kita diingatkan bahwa sejatinya hal yang paling penting diperjuangkan dan dilindungi dalam hidup ini adalah kebebasan. Dalam relasi antar-sesama, setiap pihak dituntut untuk menghormati kebebasan orang lain dengan tidak melangkahinya. Begitu juga dalam merumuskan kebijakan publik atau putusan kolektif, kita dituntut memerhatikan cara dan juga isi putusan yang tidak melanggar hak dan kebebasan. Relevansi kedua, dalam memahami kebebasan, kita tidak hanya memahaminya sebagai proses, tetapi juga sebagai kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*) atau kapabilitas. Perspektif ini teramat penting, karena pertarungan kebebasan pada akhirnya adalah soal kapabilitas kita untuk meraih hal yang dianggap bernilai. Pendekatan Sen yang sangat memerhatikan kapabilitas bisa menjadi hal yang sangat relevan bagi kita di Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Sumber Utama

- Sen, Amartya. 1985 (Apr.). "Well-Being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984." *The Journal of Philosophy*, Vol. 82, No. 4: 169-221.
- _____. 1992. *Inequality Reexamined*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. 1999. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, INC.
- _____. 2002. *Rationality and Freedom*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- _____. 2009. *The Idea of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

2. Sumber Pendukung Utama

I. Buku

- Berlin, Isaiah. 2002 [1969]. *Liberty*. ed. Henry Hardy. Oxford: Oxford University Press.
- Crocker, David A., dan Ingrid Robeyns. 2010. "Capability and Agency" dalam *Amartya Sen*, ed. Christopher W. Morris, 60-90. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hayek, Friedrich A. 1978 [1960]. *The Constitution of Liberty*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Magnis-Suseno, Franz. 1987. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Mill, John Stuart. 1978. *On Liberty*. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc.
- _____. 1996. *On Liberty – Perihal Kebebasan*. Penerjemah Alex Lanur. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nussbaum, Martha C. 2006a [2000]. *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- _____. 2011. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Nussbaum, Martha C., dan Amartya Sen. 1993. "Introduction." dalam *The Quality of Life*, ed. Martha C. Nussbaum dan Amartya Sen. 1-6. Oxford, Oxford University Press.
- Pettit, Philip. 1997. *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. 2001. *A Theory of Freedom: From the Psychology to the Politics of Agency*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. 2010. "Freedom in the Spirit of Sen." dalam : *Amartya Sen*, ed. Christopher W. Morris, 91-114. Cambridge: Cambridge University Press.

- Roberts, Kevin. 2010 "Social Choice Theory and the Informational Basis Approach." dalam *Amartya Sen*, ed. Christopher W. Morris, 115-137. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sen, Amartya dan Bernard Williams. 1982. "Introduction: Utilitarianism and Beyond." dalam *Utilitarianism and Beyond*, ed. Amartya Sen dan Bernard Williams, 1-21. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sen, Amartya. 1981. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. 1987. *Food and Freedom*. Makalah dalam Sir John Crawford Memorial Lecture. 29 Oktober 1987. Washington, D.C.
- _____. 1988 [1987]. *On Ethics and Economics*. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
- _____. 1999b. *Reason before Identity*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. 2005. *The Argumentative Indian: Writing on Indian Culture, History and Identity*. London: Penguin Books.
- _____. 2006. *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. New York: W.W. Norton & Company, Inc.

II. Jurnal

- Howe, Charles W. 1961 (Sep.). "Choice of Techniques." *The American Economic Review* Vol. 51, No. 4: 720-722.
- Klamer, Arjo. 1989 (musim dingin). "A Conversation with Amartya Sen." *Journal of Economics Perspectives* Vol. 3, No. 1: 135-150.
- Nussbaum, Martha C. 2005. "Women's Bodies: Violence, Security and Capabilities." *Journal of Human Development* Vol. 6, No. 2: 167-183.
- _____. 2003. "Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice." *Feminist Economics* 9 (2-3): 33-59.
- Sen, Amartya. 1970 (Mei). "Interpersonal Aggregation and Partial Comparability." *Econometrica* Vol. 38, No. 3: 393-409.
- _____. 1971 (Nov.-Des.). "The Impossibility of a Paretian Liberal: Reply." *The Journal of Political Economy* Vol. 79, No. 6: 1406-1407.
- _____. 1973 (Agu.). "Behaviour and the Concept of Preference." *Economica* Vol. 40, No. 159: 241-259.
- _____. 1976a (Mar.). "Poverty: An Ordinal Approach to Measurement." *Econometrica* Vol. 44, No. 2: 219-231.
- _____. 1976b (Agu.). "Liberty, Unanimity and Rights." *Economica* Vol. 43, No. 171: 217-245.
- _____. 1977a (Jan.). "Social Choice Theory: Reexamination" *Econometrica* Vol. 45, No. 1: 53-88.

- _____. 1977b (musim panas). "Rational Fools: A Critique of the behavioral Foundations of Economic Theory." *Philosophy and Public Affairs* Vol. 6, No. 4: 317-344.
- _____. 1982 (musim dingin). "Rights and Agency." *Philosophy and Public Affairs* Vol. 11, No. 1: 3-39.
- _____. 1983 (Jan.). "Liberty and Social Choice." *The Journal of Philosophy* Vol. 80, No. 1: 5-28.
- _____. 1992b (Mei). "Minimal Liberty." *Economica* Vol. 59, No.234: 139-159
- _____. 1993 (Okt). "Market and Freedoms: Achievements and Limitations of the Market Mechanism in Promoting Individual Freedoms." *Oxford Economic Papers* Vol. 45, No. 4: 519-541.
- _____. 1994 (Mei). "The Formulation of Rational Choice." *The American Economic Review* Vol. 84, No. 2: 385-390.
- _____. 1995 (Mar.). "Rationality and Social Choice." *American Economic Association* Vol. 85, No. 1: 1-24.
- _____. 2002b (Sep.). "Open and Closed Impartiality." *The Journal of Philosophy* Vol. 99, No. 9: 445-469.
- Sugden, Robert. 1986 (Sep.). "Commodities and Capabilities." *The Economic Journal*, Vol. 96, No. 383: 820-822.

3. Sumber Pendukung Tambahan

- Alkire, Sabina, Mozaffar Qizilbash, dkk. 2008. Pengantar dalam *The Capability Approach: Concepts, Measures and Applications*, ed. Flavio Comim, Mozaffar Qizilbash, dkk., 1-25. Cambridge: Cambridge University Press.
- Alkire, Sabina. 2002. *Valuing Freedom: Sen's Capability Approach and Poverty Reduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Aristotle. 2004. *Nicomachean Ethics*. diterjemahkan dan diedit oleh Roger Crisp. Cambridge: Cambridge University Press.
- Arrow, Kenneth J. 1963 (1951). *Social Choice and Individual Values*. New York, London, Sidney: John Wiley & Sons, Inc.
- Bentham, Jeremy. 1823 (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: The Clarendon Press.
- Craven, John. 1992. *Social Choice: A Framework for Collective Decisions and Individual Judgements*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dworkin, Ronald. 2000. *Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Farrelly, Colin. 2004. *Introduction to Contemporary Political Theory*. London: Sage Publication.
- Force, Pierre. 2003. *Self-Interest before Adam Smith: A Genealogy of Economic Science*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Foster, James dan Amartya Sen. 1973. *On Economic Inequality*. New York: Oxford University Press.
- Freeman, Samuel. 2007. *Rawls*. New York: Routledge.
- Friedman, Milton. 1982 [1962]. *Capitalism and Freedom*. Chicago: The University of Chicago.
- Greaves, Bettina Bien. 2002 (1985). Prakata dalam *Liberalism in the Classical Liberalism* oleh Ludwig von Mises, v-viii. San Francisco: Cobden Press.
- Herry-Priyono, B. 2015. "Amartya Sen Membongkar Rasionalitas," *Diskursus* 14: 28-79.
- Hobbes, Thomas. 1974. *Leviathan*. Ed. C. B. Macpherson. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books.
- Kant, Immanuel. 2002. *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. Ed. Allen Wood. New Haven dan London: Yale University Press.
- Kloppenber, James T. 1998. *The Virtues of Liberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Kwang Ng. Yew. 2004. *Welfare Economics: Towards a More Complete Analysis*. New York: Palgrave Macmillan.
- Locke, John. 1970. *Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press.
- LPPKB. 2006. *Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB).
- Magnis-Suseno, Franz. 1997. *13 Tokoh Etika*. Jogjakarta: Penerbit Kanisius.
- Majumdar, Tapas. 1998. "Amartya Sen in Search of Impure Welfare Economics: Finding New Space," *Economic and Political Weekly* 33: 2860-2862.
- Marx, Karl. 2000. "The German Ideology," dalam *Karl Marx Selected Writing*, ed. David McLellan, Oxford: Oxford University Press.
- Mill, John Stuart. 1906. *Utilitarianism*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Morris, Christopher W. 2010. "Introduction." *Amartya Sen*, ed. Christopher W. Morris. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nelson, Brian (ed.). 2009. *A Comprehensive Dictionary of Economics*. Chandigarh-India: Abhishek Publications.
- Nitzan, Shmuel. 2010. *Collective Preference and Choice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nozick, Robert. 1974 [1971]. *Anarchy, State and Utopia*. Oxford: Basil Blackwell.
- _____. 2004. "The Entitlement Theory of Justice." dalam *Contemporary Political Theory: A Reader*, ed. Colin Farelly. London: Sage Publication.
- Nussbaum, Martha C. 2006b. *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Przeworski, Adam, Michael Alvarez, José Antonio Cheibub dan Fernando Limongi. 1996. "What Makes Democracies Endure?" *Journal of Democracy* 7.1: 39-55.
- Rauf, Maswadi dkk. 2015. *Indeks Demokrasi Indonesia 2013, Tantangan Konsolidasi Demokrasi: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adab Berdemokrasi*. Jakarta: Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Badan Pusat Statistik.
- Rawls, John. 1993. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press.
- _____. 1999 [1971]. *A Theory of Justice* (edisi revisi). Cambridge, MA: Harvard University Press Cambridge.
- _____. 2000. *Lectures on the History of Moral Philosophy*. Ed. Barbara Herman. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- _____. 2001. *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge, MA: Harvard University Press Cambridge.
- Ricoeur, Paul. 2007. *Reflection on the Just*. Diterjemahkan oleh David Pellauer. Chicago: The University of Chicago Press.
- Rutherford, Donald. 1992. *Routledge Dictionary of Economics*. London and New York: Routledge.
- Sandel, Michael J. 2009. *Justice: What's the Right Thing To Do?*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Scanlon, Thomas M. 1982. "Contractualism and Utilitarianism," dalam *Utilitarianism and Beyond*, ed. Amartya Sen dan Bernard Williams. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sen, Amartya. 2003. "Sraffa, Wittgenstein and Gramsci" *Journal of Economic Literature* XLI: 1240-1255.
- Smith, Adam. 1937. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. New York: The Modern Library.
- _____. 2004. *The Theory of Moral Sentiment*. Ed. Knud Haakonssen. Cambridge: Cambridge University Press.
- Suryajaya, Martin. 2013. *Asal Usul Kekayaan: Sejarah Teori Nilai dalam Ilmu Ekonomi dari Aristoteles Sampai Amartya Sen*. Yogyakarta: Resist Book.
- Suzumura, Kotaro. 2002. Pengantar dalam *Handbook of Social Choice and Welfare*, eds. Kenneth J. Arrow, Amartya Sen dan Kotaro Suzumura. Amsterdam: Elsevier Science B.V.
- Syamsi, Syam Surya. 2013. *Teori dan Etika Pembangunan Amartya Sen Pendekatan Kebebasan, Kapabilitas dan Pentingnya Komitmen Bagi Pembangunan*. Disertasi Doktor di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia.
- Ten, C.L. 2008. "Mill's *On Liberty*: Introduction." dalam *Mill's On Liberty*. ed. C.L. Ten. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tseng, Chuan Chia. 2011. *Microfinance and Amartya Sen's Capability Approach*. Disertasi di Institute of Philosophy, University of Birmingham.

- Vizard, Polly. 2006. *Poverty and Human Rights: Sen's 'Capability Perspective' Explored*. Oxford: Oxford University Press.
- Wolff, Richard D. dan Stephen A. Resnick. 2002. *Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Zink, John Jeffrey. 2005. *Amartya Sen and Freedom: A Critique*. A Dissertation Submitted to the Faculty of the University of Utah.

Sumber dari Website

- <http://kbbi.web.id/preferensi> (diunduh 13 Oktober 2014)
- <http://philosophy.uchicago.edu/faculty/nussbaum.html> (diunduh 20 November 2014)
- <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/kasus-sampang-pemerintah-berpotensi-lakukan-kejahatan-genosida/1183930> (diunduh 21 April 2015)
- <http://www.tempo.co/read/news/2014/12/08/078627113/5-Lembaga-Desak-Jokowi-Sikapi-Ahmadiyah-NTB> (diunduh 25 April 2015)
- <http://www.tempo.co/read/news/2014/12/23/173630488/Komnas-HAM-Minta-Jokowi-Tangani-Kasus-GKI-Yasmin> (diunduh 21 April 2015)
- <http://www.thefreedictionary.com/entitlement> (diunduh 26 Juni 2015)
- <https://hd-ca.org/about/hdca-history-and-mission> (diunduh 16 Maret 2015)
- Report by the "Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress" di www.stiglitz-sen-fitoussi.fr (diunduh 9 Oktober 2012)
- www.nobelprize.org "Amartya Sen - Biographical". *Nobelprize.org*. Nobel Media AB 2013. Web. 8 Jan 2014. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1998/sen-bio.html

RIWAYAT HIDUP

SUNARYO adalah pengajar di Program Studi Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, Jakarta sejak 2011-hingga kini. Ia pernah mengajar di Islamic College for Advanced Studies (ICAS) pada tahun 2009 dan di Universitas Al-Azhar Jakarta pada tahun 2013-2014. Selain itu, ia juga adalah Direktur Eksekutif Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia) sejak 2013-hingga kini, Sekretaris Program di Nurcholish Madjid Society (NCMS) sejak 2011-hingga kini dan dewan redaksi di Jurnal Titik Temu dari 2011-hingga kini. Ia pernah menjadi asisten peneliti di The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia pada 2002-2004.

Ia mengambil program doctoral di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta sejak 2012 berkat dukungan beasiswa dari Herb Feith Foundation (HFF) yang berkantor di Australia. Sebelumnya ia telah menyelesaikan program magister (2008-2011) dan strata satu (2001-2006) dari kampus yang sama.

Ia juga pernah sempat kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN [kini UIN]), Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1999 namun tidak diselesaikan. Ia pernah menyelesaikan kuliah di *Majma' Marhalah al-'Ulya* di Pesantren Annida Bekasi, Jawa Barat (1997-2001).

Aktivitasnya banyak terkait dengan program pengembangan nilai dan praktik demokrasi di kalangan mahasiswa lewat jaringan universitas di beberapa kota di Indonesia. Ia juga aktif dalam mengorganisasikan diskusi rutin Kajian Titik Temu (KTT) dua bulanan yang dikelola oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS).

Selain mengajar ia juga aktif menulis artikel di jurnal ilmiah dan surat kabar. Ia pernah menjadi kontributor beberapa buku, di antaranya adalah buku *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi* (2008), *Reorientasi Pembaruan Pemikiran Islam* (2011), *Hermeneutika Pasca-Kolonial* (2004), dan mengedit buku *Nalar Ekonomi-Politik Indonesia* yang ditulis oleh Prof. Dr. Dawam Rahardjo (2011).

Email yang dapat diakses adalah: aryomail2678@yahoo.com dan aryomail2678@gmail.com